

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

Penelitian ini mendeskripsikan Implementasi Program Pendidikan Inklusif di Kota Padang Program Pendidikan Inklusif merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 70 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Inklusif. Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan Implementasi Program Pendidikan Inklusif di Kota Padang telah berjalan baik namun belum optimal. Akan tetapi jika dikaitkan Teori Impelementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh UPTD Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif Kota Padang belum memadai dalam pelaksanaan program, terdapat kekurangan tenaga ahli dalam memberikan pelayanan identifikasi-asesmen untuk ABK. Identifikasi adalah menemukenali jenis dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Asesmen adalah proses untuk menyaring kemampuan potensi individu, yaitu kemampuan akademik dan kemampuan inteligensi (IQ). Hasil asesmen akan direkomendasikan tindak lanjut, dan digunakan oleh guru/pelatih dalam penyusunan program layanan. Terdapat kendala-kendala, sikap dan penerimaan dari sekolah terhadap program itu sendiri. Respon dari sekolah terhadap Program Pendidikan Inklusif belum terlalu baik, adanya penolakan yang dilakukan sekolah terhadap siswa ABK, dan sikap acuh tak acuh dari guru dan kepala sekolah mengakibatkan implementasi Program Pendidikan Inklusif di Kota Padang hanya sekedar formalitas saja. Komunikasi dan Koordinasi antara UPTD Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif Kota Padang telah berjalan dengan baik, hanya saja ada beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan koordinasi dan komunikasi ke sekolah-sekolah reguler terhadap Program Pendidikan

Inklusif mengingat banyaknya sekolah reguler terutama sekolah dasar yang ada di Kota Padang. Sehingga tidak semua sekolah mendapatkan sosialisasi maupun pelatihan terhadap guru mengenai Program Pendidikan Inklusif.

Pemerintah Kota Padang mendukung pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif Kota Padang adanya pembahasan naskah akademik dalam perumusan Peraturan Walikota Padang mengenai Program Pendidikan Inklusif mengingat tujuan Kota Padang sebagai Kota Inklusif, namun dukungan dari masyarakat maupun sekolah terhadap Program Pendidikan Inklusif belum baik, masih banyak masyarakat yang belum memahami dan belum sadar bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang sama di lingkungan sekolah reguler. lingkungan sosial dari masyarakat yang menganggap ABK tidak memiliki kemampuan dalam bidang akademik dan ABK dianggap sesuatu yang diasingkan dan dikucilkan bahkan belum menerima kedisabilitas seseorang sehingga melahirkan sikap acuh tak acuh sehingga menyulitkan terlaksananya Program Pendidikan Inklusif.

## **1.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti ingin memberikan saran terkait implementasi Program Pendidikan Inklusif di Kota Padang dapat dilihat sebagai berikut :

1. Perlunya adanya tambahan sumber daya manusia terutama tenaga ahli yang dibutuhkan dalam melakukan identifikasi asesmen di UPTD Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif Kota Padang, mengingat jumlah ABK di Kota Padang yang banyak dan dari luar Kota Padang melakukan identifikasi-asesmen di UPTD Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif.

2. Perlu adanya sosialisasi mendalam kepada Satuan Pendidikan dan masyarakat serta orang tua, sehingga tidak lagi acuh tak acuh maupun tidak memahami dan menerima ABK di lingkungan sekitar sehingga terlaksananya pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif sesuai dengan tujuannya yaitu menerima keanekaragaman dan perbedaan di lingkungan sekitar baik itu orang dengan disabilitas maupun perbedaan lainnya.
3. UPTD Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif Kota Padang sebaiknya melakukan kerja sama dengan Intansi lain, mahasiswa, maupun LSM, narasumber PLB dalam peningkatan inovasi pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif di Kota Padang.
4. Satuan Pendidikan bersama dengan UPTD Layanan Disabilitas Layanan Pendidikan Inklusif Kota Padang lebih gencar lagi dalam implementasi Program Pendidikan Inklusif dengan berbagai strategi pemberdayaan, sehingga untuk meningkatkan rasa empati dan pemahaman mengenai ABK, dan sikap penerimaan terhadap Program Pendidikan Inklusif.
5. Perlu adanya dukungan dari lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar masyarakat sehingga pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif dapat berjalan dengan optimal.
6. Perlu adanya dukungan yang berkelanjutan dari Pemerintah Kota Padang sehingga pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif dapat berjalan dengan optimal, demi terciptanya tujuan Kota Padang sebagai Kota Inklusif.